



# Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Taman Kota sebagai Ruang Publik Multifungsi di Bundaran Besar Palangkaraya

Rosa Nadaeva<sup>1</sup>, Putri Marcela<sup>2</sup>, Rira Kristiana<sup>3</sup>, Rendy Stalar<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangkaraya, Indonesia

Email : [rosanada029@gmail.com](mailto:rosanada029@gmail.com)<sup>1</sup>, [putrimarcela28@gmail.com](mailto:putrimarcela28@gmail.com)<sup>2</sup>, [rirarakristiani@gmail.com](mailto:rirarakristiani@gmail.com)<sup>3</sup>, [rendystalar@gmail.com](mailto:rendystalar@gmail.com)<sup>4</sup>

\*Penulis Korespondensi: [rosanada029@gmail.com](mailto:rosanada029@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the effectiveness of local government policies in infrastructure development and urban park management as multifunctional public spaces at Bundaran Besar Palangkaraya. Rapid urban development and increasing community needs for public spaces have encouraged the government to revitalize this area as a city landmark and social interaction space. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through literature review, observation, and documentation. The results show that the development and revitalization of Bundaran Besar have improved aesthetic quality, public facilities, environmental conditions, and social functions. However, several challenges remain, including limited accessibility for certain groups, suboptimal management and maintenance systems, and traffic and parking issues during peak hours. The analysis indicates that although government policies have contributed positively to the development of public spaces, their effectiveness is still not fully optimal. Therefore, stronger governance, community participation, and sustainable management strategies are needed to enhance the role of Bundaran Besar as an inclusive, functional, and sustainable public space.*

**Keywords:** *Bundaran Besar Palangkaraya; Infrastructure Development; Local Government Effectiveness; Public Space; Urban Park*

**Abstrak.** Bundaran Besar Palangkaraya merupakan salah satu ruang publik utama yang berfungsi sebagai landmark kota dan pusat aktivitas masyarakat. Seiring dengan perkembangan perkotaan yang pesat serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik, pemerintah daerah melakukan kebijakan pembangunan infrastruktur dan revitalisasi kawasan ini agar dapat berfungsi sebagai ruang publik multifungsi, dimana kawasan ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai ruang lalu lintas tetapi juga sebagai tempat berolahraga, bersantai, dan berinteraksi sosial dengan adanya berbagai fasilitas seperti jalur pedestrian, taman kota, area duduk, serta elemen estetika seperti pencahayaan dan ornamen khas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan taman kota di Bundaran Besar Palangkaraya sebagai ruang publik multifungsi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa studi literatur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Bundaran Besar telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas estetika, fungsi sosial, dan kondisi lingkungan kawasan sehingga mampu menjadi ruang publik yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat seperti rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaannya seperti keterbatasan aksesibilitas bagi kelompok tertentu, sistem pengelolaan dan pemeliharaan yang belum optimal, serta permasalahan parkir dan kemacetan pada waktu-waktu tertentu, sehingga diperlukan peningkatan tata kelola, partisipasi masyarakat, serta strategi pengelolaan yang berkelanjutan agar Bundaran Besar dapat berfungsi secara optimal sebagai ruang publik yang inklusif, nyaman, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Bundaran Besar Palangkaraya; Efektivitas Pemerintah Daerah; Pembangunan Infrastruktur; Ruang Publik; Taman Kota

## 1. LATAR BELAKANG

Kota Palangkaraya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta pembangunan infrastruktur perkotaan. Sebagai kota yang berkembang, Palangkaraya menghadapi berbagai tantangan dalam penataan ruang kota, khususnya dalam penyediaan

ruang publik yang memadai dan berkelanjutan. Salah satu kawasan yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan kota adalah Bundaran Besar Palangkaraya yang berfungsi sebagai landmark kota sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Kawasan ini memiliki peran strategis karena menjadi titik pertemuan berbagai jalur transportasi serta ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Menurut Carr et al. (1992), ruang publik memiliki fungsi penting sebagai tempat interaksi sosial, rekreasi, serta pembentukan identitas kota yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Selain itu, Lynch (1960) menjelaskan bahwa *landmark* kota memiliki peranan penting dalam membentuk citra kota dan orientasi ruang bagi masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang nyaman dan representatif, pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur dan revitalisasi Bundaran Besar agar dapat berfungsi sebagai ruang publik multifungsi. Revitalisasi tersebut mencakup peningkatan fasilitas seperti jalur pedestrian, taman kota, area rekreasi, serta elemen estetika yang mencerminkan identitas lokal. Namun, dalam proses pembangunan tersebut masih terdapat berbagai permasalahan, seperti keterbatasan aksesibilitas, pengelolaan yang belum optimal, serta permasalahan lalu lintas dan parkir yang dapat mempengaruhi kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik tersebut (Gehl, 2011; Carmona et al., 2010; Saputra & Wijaya, 2025).

Secara umum, pembangunan perkotaan yang tidak diimbangi dengan perencanaan yang berkelanjutan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), meningkatnya polusi, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberadaan taman kota dan ruang terbuka hijau menjadi sangat penting sebagai bagian dari solusi dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Chiesura, 2004; Hakim & Utomo 2003).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal sebesar 30% dari luas wilayah kota. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan taman kota sebagai bagian dari ruang publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan taman kota di Bundaran Besar Palangkaraya sebagai ruang publik multifungsi guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan (Budihardjo, 1997).

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (a) bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan taman kota di Bundaran Besar Palangkaraya sebagai ruang publik multifungsi, (b) sejauh mana Bundaran Besar Palangkaraya berfungsi sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas sosial masyarakat, dan (c) apa saja kendala dan tantangan dalam pengelolaan Bundaran Besar Palangkaraya sebagai ruang publik yang berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (a) menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan taman kota di Bundaran Besar Palangkaraya, (b) mengevaluasi peran Bundaran Besar Palangkaraya sebagai ruang publik multifungsi bagi masyarakat, dan (c) mengidentifikasi kendala serta merumuskan strategi pengelolaan yang berkelanjutan terhadap Bundaran Besar Palangkaraya.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman yang memiliki manfaat ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Berdasarkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro (1992) dan Johannesburg (2002), disepakati bahwa sebuah kota idealnya memiliki RTH minimal 30% dari luas wilayahnya. RTH merupakan elemen penting dalam ruang perkotaan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekologi serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

Dalam konteks Kota Palangkaraya, keberadaan RTH menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan aktivitas perkotaan. Kawasan seperti Bundaran Besar Palangkaraya dapat dikategorikan sebagai bagian dari ruang terbuka kota yang memiliki fungsi ekologis sekaligus sosial, karena selain berperan sebagai elemen estetika kota, juga menjadi ruang interaksi masyarakat.

Tipologi RTH berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu RTH berbentuk kawasan atau areal dan RTH berbentuk jalur atau memanjang. Menurut Grey (1996), bentuk RTH meliputi taman kota, alun-alun, jalur hijau, sempadan sungai, serta kawasan khusus lainnya. RTH memiliki manfaat utama dalam meningkatkan kualitas lingkungan, seperti penyerapan karbon, pengendalian suhu, serta menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.

## **Taman Kota sebagai Ruang Publik**

Taman kota merupakan salah satu bentuk RTH yang memiliki fungsi sebagai ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Secara konseptual, ruang publik adalah area yang dapat digunakan oleh masyarakat secara bebas tanpa adanya batasan tertentu, seperti trotoar, taman, dan ruang terbuka lainnya. Taman kota tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai sarana rekreasi, interaksi sosial, edukasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks Bundaran Besar Palangkaraya, kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai simpul lalu lintas, tetapi juga sebagai ruang publik multifungsi yang menyediakan berbagai fasilitas seperti jalur pedestrian, taman, area duduk, serta elemen estetika yang mendukung aktivitas masyarakat. Keberadaan fasilitas tersebut menjadikan Bundaran Besar sebagai ruang publik yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti olahraga, bersantai, dan interaksi sosial.

Selain itu, keberlanjutan ruang publik ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kemudahan akses, partisipasi masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kontribusi terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, pengelolaan taman kota harus memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

## **Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur**

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan, termasuk dalam penyediaan ruang publik dan taman kota. Kebijakan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata ruang kota, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan Bundaran Besar Palangkaraya, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya revitalisasi untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai ruang publik. Pembangunan tersebut mencakup peningkatan fasilitas umum, penataan lanskap, serta penambahan elemen estetika yang mencerminkan identitas lokal. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut masih perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **Pengelolaan Ruang Publik Berkelanjutan**

Pengelolaan ruang publik yang berkelanjutan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kota modern. Konsep keberlanjutan mencakup tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ruang publik, keberlanjutan dapat dilihat dari

kemampuan kawasan tersebut dalam mendukung aktivitas masyarakat tanpa merusak lingkungan serta tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Bundaran Besar Palangkaraya sebagai ruang publik memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang baik harus memperhatikan aspek kenyamanan, aksesibilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan ruang tersebut. Selain itu, pengelolaan yang berkelanjutan juga harus mampu mengatasi berbagai permasalahan seperti kemacetan, parkir, serta pemeliharaan fasilitas agar kawasan tetap berfungsi secara optimal dalam jangka panjang.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan taman kota sebagai ruang publik multifungsi di Bundaran Besar Palangkaraya. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta sumber lain yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, ruang publik, dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Kajian pustaka merupakan strategi utama dalam penelitian ini, yang dilakukan melalui proses membaca, mencatat, serta menganalisis berbagai referensi yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh para peneliti dan akademisi yang relevan dengan topik penelitian (Taylor & Procter, 2010).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena yang terjadi secara mendalam. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti kebijakan pemerintah daerah, data perencanaan kota, serta hasil penelitian sebelumnya. Menurut Moleong (2001), studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap data, tetapi juga sebagai sumber informasi yang kaya akan nilai historis dan kontekstual sehingga dapat memperkuat validitas hasil penelitian.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi peran, efektivitas, serta kendala dalam pembangunan dan pengelolaan Bundaran Besar Palangkaraya sebagai ruang publik. Analisis dilakukan dengan

mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti kebijakan pemerintah, fungsi ruang publik, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bundaran Besar Palangkaraya memiliki peran penting sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaannya, seperti keterbatasan fasilitas, pengelolaan yang belum optimal, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ruang publik. Temuan ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang publik di Kota Palangkaraya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Istilah ruang publik pertama kali dikemukakan oleh Lynch yang menyatakan bahwa ruang publik merupakan titik dan landmark yang membantu masyarakat dalam mengenali dan menavigasi ruang kota. Konsep ruang publik kemudian berkembang seiring dengan munculnya *civil society*, dimana filsuf Jerman Jurgen Habermas memperkenalkan konsep ruang publik sebagai wadah interaksi sosial dalam karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Yulianto, 2014). Dalam konteks perkotaan, ruang terbuka hijau (RTH), baik yang bersifat publik seperti taman kota dan jalur pedestrian, maupun yang bersifat non-publik seperti alun-alun dan area terbuka lainnya, dapat dikategorikan sebagai bagian dari ruang publik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota minimal sebesar 30% dari luas wilayah, dengan 20% di antaranya merupakan ruang terbuka hijau publik. RTH memiliki fungsi utama sebagai paru-paru kota, daerah resapan air, serta elemen peneduh yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Dalam konteks Kota Palangkaraya, Bundaran Besar merupakan salah satu ruang publik strategis yang memiliki peran penting sebagai landmark kota sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai simpul lalu lintas, tetapi juga sebagai ruang publik multifungsi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti olahraga, rekreasi, dan interaksi sosial. Revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah menghadirkan berbagai fasilitas pendukung, seperti jalur pedestrian, taman kota, area duduk, serta pencahayaan yang menarik sehingga meningkatkan daya tarik kawasan, terutama pada malam hari.

Bundaran Besar Palangkaraya saat ini menjadi ruang publik yang aktif digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan, seperti berjalan santai, berolahraga, berkumpul bersama keluarga, serta kegiatan komunitas. Keberadaan fasilitas yang memadai serta lokasi yang strategis menjadikan kawasan ini mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, fungsi estetika yang ditampilkan melalui penataan lanskap dan elemen visual kota juga memberikan nilai tambah sebagai identitas kota. Dengan demikian, Bundaran Besar tidak hanya berperan sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memperkuat interaksi masyarakat.

Namun demikian, dalam pengelolaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi fungsi ruang publik tersebut. Permasalahan yang sering terjadi antara lain kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan, keterbatasan area parkir, serta belum optimalnya sistem pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas. Selain itu, aksesibilitas bagi kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif, efektivitasnya masih belum sepenuhnya optimal.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ruang publik seperti Bundaran Besar memiliki peran penting dalam mendukung aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberadaan ruang publik yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi lokal, serta menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan yang lebih terintegrasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta penerapan prinsip keberlanjutan agar Bundaran Besar Palangkaraya dapat terus berkembang sebagai ruang publik yang inklusif, nyaman, dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengembangan Bundaran Besar Palangkaraya sebagai ruang publik multifungsi menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan infrastruktur dan taman kota dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Revitalisasi yang dilakukan telah mampu meningkatkan kualitas kawasan melalui penyediaan berbagai fasilitas seperti jalur pedestrian, taman kota, area duduk, serta elemen pencahayaan yang menarik, sehingga menjadikan Bundaran Besar sebagai ruang publik yang lebih nyaman, fungsional, dan representatif bagi masyarakat. Keberadaan kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai simpul lalu lintas, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, rekreasi, dan aktivitas komunitas yang memperkuat identitas kota Palangkaraya.

Pengembangan Bundaran Besar juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya ruang publik yang tertata dengan baik, masyarakat memiliki tempat untuk berolahraga, bersantai, serta melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ruang publik memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini meliputi aspek teoretis, praktis, dan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan ruang publik, serta integrasi fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi di kawasan perkotaan. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan dan pengelolaan ruang publik yang lebih adaptif, inklusif, serta berbasis pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, dari aspek kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan ruang publik dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, dimana data yang digunakan sebagian besar berasal dari studi literatur dan sumber sekunder sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi empiris secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode (mixed methods) dengan melibatkan data lapangan secara langsung, serta melakukan analisis yang lebih komprehensif terkait partisipasi masyarakat dan dampak pembangunan terhadap lingkungan dan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Bundaran Besar Palangkaraya dapat terus berkembang sebagai ruang publik yang inklusif, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat di masa yang akan datang.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya. (2023). *Kota Palangkaraya dalam angka*.
- Budihardjo, E. (1997). *Tata ruang perkotaan*. Alumni.
- Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2010). *Public places urban spaces: The dimensions of urban design*. Routledge.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public space*. Cambridge University Press.
- Chiesura, A. (2004). The role of urban parks for the sustainable city. *Landscape and Urban Planning*, 68(1), 129–138. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2003.08.003>
- Cohen, S. A. (2015). *The sustainable city*. Columbia University Press.

- Gazali, I. (2017). Revitalisasi kawasan Citra Niaga Samarinda. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, 1(2), 131–140. <https://doi.org/10.30822/artk.v1i2.129>
- Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.
- Lovejoy, D. (1979). *Land use and landscape planning* (2nd ed.). Leonard Hill.
- Lynch, K. (1960). *The image of the city*. MIT Press.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pourdehqan, B., Rashidi, M., Firouzbakht, M. S., & Najafi, N. (2015). Environment and sustainable architecture. *European Online Journal of Natural and Social Sciences*, 3(3s), 5–10.
- Priyogo, A. (2015). *Taman wisata kuliner nusantara di Salatiga* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Santoso, H., & Wijaya, A. (2021). Indikator keberlanjutan ruang publik di kota-kota kecil: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 18(1), 45–59. <https://doi.org/10.14710/jpwk.18.1.45-59>
- Soelistyarini, T. D. (2013). *Pedoman penyusunan tinjauan pustaka dalam penelitian dan penulisan ilmiah*. Universitas Airlangga.
- Taylor, D. M. P. (2010). *Literature review: A few tips on conducting it*. University of Toronto Writing Center.
- Tremblay, J., Nguyen, H., & Sari, M. (2022). Urban forest ecosystem services in Southeast Asia: Challenges and opportunities for sustainability. *Journal of Urban Ecology*, 8(2), 101–115. <https://doi.org/10.1093/jue/juaa034>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Wahyu Aji Saputra, & Wijaya, A. R. C. (2025). Penegakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Sukabumi. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5), 39–45. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.117>
- Yulianto, F. (2014). *Perencanaan kawasan public space di lahan bekas terminal bus Kartosuro* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta].